



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

**RAPAT PENGESAHAN JADWAL ACARA RAPAT-RAPAT BADAN LEGESLASI
DPR RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019-2020**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 31 Oktober 2019
Pukul	: 11.15 - 12.21 WIB
Tempat	: RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H
Acara	: Rapat Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legeslasi DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020
Sekretariat	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 56 orang, izin 3 orang, sakit - orang dari 80 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Willy Aditya

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

15 dari 17 orang Anggota

1. Sturman Panjaitan, S.H.,
2. Andreas Hugo Pareira
3. I Wayan Sudirta, S.H.,
4. Masinton Pasaribu, S.H.,
5. Vita Ervina, S.E
6. Dr. H. Muftia A. N. Anam
7. Darmadi Durianto
8. Syafruddin H. Maming, S.Sos.
9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
10. Selly Andriany Gantina, A.Md.
11. H. Abidin Fikri, S.H, M.H
12. Dr. Sofyan Tan
13. Putra Nababan
14. Maria Lestari, S.Pd.
15. Ir. Andreas Eddy Susetyo,MM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 12 orang Anggota

1. Nurul Arifin
2. Dra. Wenny Haryanto, SH
3. Zulfikar Arse Sadikin, S.IP, M.Si.,
4. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH.,
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M
6. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H
7. Trifena M. Tinal, B.Sc
8. Rudy Mas'ud, S.E

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

6 dari 10 orang Anggota

1. Heri Gunawan, SE
2. Hendrik Lewerissa, SH, LL.M
3. H. Rahmat Muhajirin, SH
4. H.R Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum
5. R Imron Amin, SH, MH
6. Iis Edhy Prabowo, S.Hum, MM

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Taufik Basari, S.H., S.Hum, LLM
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E.,
3. Hillary Brigitta Lasut, S.H
4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H
5. Aminurokhman, S.E., M.M

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

5 dari 7 orang Anggota

1. Farida Hidayati, SH, M.Kn
2. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I
3. Neng Eem Marhamah Zulfa HIZ, M.M
4. H. Sukamto, S.H.
5. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Bambang Purwanto, S.ST., MH
2. Santoso, S.H
3. Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, SH, MH, ACCS
4. Sartono, SE, MM
5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.,

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

6 dari 7 orang Anggota:

1. Dr. H. Al Muzzamil Yusuf, M.Si
2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. KH. Bkhorri, L.C., M.A
5. Amin AK, M.M
6. Dr. H. Mulyanto, M.Eng

FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

2 dari 6 orang Anggota:

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si
2. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

2 dari 2 Anggota:

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE
2. Dr. H. Syamsurizal, SE, MM

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH/F-GERINDRA):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi,

Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berekanannya-lah sehingga pada hari ini kita bisa melakukan rapat Badan Legislatif pertama kali.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat Anggota yang telah menandatangani daftar hadir 26 orang anggota, yang ijin 1 orang dan dihadiri oleh 9 fraksi dengan demikian rapat ini kita bisa buka dan di nyatakan telah dimulai sesuai dengan Peraturan DPR berdasarkan dengan kourum Fraksi. Setuju Pak ya, dengan demikian Rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi,

Dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Rapat kita pada hari ini adalah dalam rangka untuk pengesahan jadwal-jadwal rapat kita selama masa persidangan pertama di tahun 2019-2020. Oleh karena itu sebelum kita memulai

saya ingin membacakan jadwal dan susunan jadwal acara kita pada hari ini yang pertama adalah;

1. Pengantar ketua rapat.
2. Tanggapan Anggota terhadap rancangan jadwal acara Badan Legislasi.
3. Pengesahan jadwal acara Badan Legislasi masa Persidangan I pada Tahun Sidang 2019-2020 dan terakhir.
4. Penutup.

Rapat ini karena hari ini ada Paripurna dan mungkin sebagian anantara kita akan hadir dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat pimpinan pengganti rapat badan musyawarah pada jam 1 siang yang akan datang. Oleh karena itu acara kita mungkin bisa berlangsung ya sampai dengan pukul 12, setuju Pak ya,

(RAPAT: SETUJU)

Kalau sudah ada Pak Taubas aman semua itu, apalagi ada Pak Inton. Pertama-tama atas nama Pimpinan Badan Legislasi kami mengucapkan selamat datang di Badan Legislasi pada rapat hari ini adalah rapat pertama, sehubungan dengan hal tersebut perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri sebagai pimpinan Badan Legislasi. Yang pertama saya sendiri, Supratman Andi Agtas, dari Fraksi Gerindra, yang *Alhamdulillah* periode ini masih dipercaya untuk menduduki kembali sebagai Ketua Badan Legislasi, terima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra yang mempercayakan kembali kepada saya untuk mewakili Fraksi untuk menjadi Pimpinan di Badan Legislasi.

Yang kedua Ibu Rieke Diah Pitaloka dalam perjalanan dari Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan. Berikutnya Pak Willy Aditya, dari Fraksi Partai Nasdem. Berikutnya Drs.H. Ibnu Multazam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan H. Achmad Baidowi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kebetulan Pak Achmad Baidowi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mendapat kesembuhan supaya cepat bisa bersama dengan kita.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa masa persidangan Tahun Sidang 2019-2020 merupakan masa persidangan awal periode keanggotaan 2019-2024. Masa sidang pertama dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 12 Desember 2019, dan masa Reses pertama dimulai tanggal 13 Desember sampai dengan 5 Januari 2020. Adapun Jadwal acara Rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I tahun 2019-2020 akan diisi dengan kegiatan;

1. Melakukan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan kegiatan sebagai berikut;
 - Megadakan kunjungan kerja ke Daerah.
 - Mengadapan RDP, atau RDPU dengan pakar dan narasumber.
 - Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Menkopolkam, Menko Ekuin, Kepala Bappenas dan mengadakan Rapat Kordinasi dengan Menkunham RI dan DPD RI.

2. Melakukan pembahasan Peraturan DPR RI terkait dengan Tata Tertib dan lain-lain. Terkait dengan jadwal acara Baleg secara lengkap sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak/ Ibu semua Anggota Badan Legislasi oleh karena itu saya pikir tidak perlu saya bacakan lagi intinya Insya Allah pada Masa Persidangan pertama ini yang pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pimpinan Wakil Ketua DPR RI kemarin bahwa bagaimana kemudian tugas dan kewajiban Pimpinan untuk membuat semua teman-teman di Anggota Badan Legislasi diawal Masa Persidangan ini untuk kita membuat sebuah kebersamaan dan semua bisa tertawa. Di Badan Legislasi ini yang kita bisa lakukan di tahap awal adalah dalam rangka penyerapan aspirasi dalam bentuk Kunjungan Kerja, didalam Jadwal kita sudah menentukan bahwa Insya Allah dimulai pada tanggal 14 kita akan melakukan Kunjungan Kerja ke 6 wilayah Provinsi. Oleh karena itu kami berharap nantinya kepada seluruh poksi untuk segera mengirimkan nama-nama anggota berdasarkan daerah yang akan di Kunjungi sekaligus kita menyerap Aspirasi dalam rangka untuk sosialisasi program Legislasi Nasional kita untuk Tahun 2020 yang akan datang.

Oleh karena itu saya persilakan Kepada Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi yang saya hormati untuk mungkin akan memberi tanggapan atau memberi masukan berkaitan dengan jadwal yang telah kami bagikan kepada Bapak/Ibu sekalian. Prinsipnya jadwal ini bersifat tentatif, sewaktu-waktu bisa berubah, tetapi penekanan kita bahwa Insya Allah dalam waktu dekat karena ada dalam rangka memberi respon terhadap keinginan Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi kemarin yang akan menyusun atau mengusulkan adanya Omnibus Law kita juga ini Omnibus Law ini pengalaman pertama kalau itu terjadi di Badan Legislasi maupun di DPR. Oleh karena itu kita perlu mendengar masukan Insya Allah mungkin dalam sebelum melakukan Kunjungan Kerja kita akan mengundang ke Menkopulhukam kemudian ke Menko Ekuin dan juga Kepala Bappenas serta dengan Menkumham untuk mendapatkan penjelasan apakah materi Omnibus Law itu akan segera dimasukkan dalam rancangan Prolegnas di Tahun 2020 atau tidak. Oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman Anggota Badan Legislasi terima kasih kalau ada yang memberi masukan terhadap Jadwal acara kita, Pak Masinton silakan.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):

Terima kasih Ketua.

Sebelum ke substansi menurut saya ini, ini barang sudah geser ini, saya geser gini, biar gini, ya maksudnya pas ke geser, kegeser saya mau katakan begini Pak Ketua, tahun ketahun ini maka di luar substansi tadi karena ini kita baru mulai rapat, tahun ketahun inilah ruangan yang paling buruk, di seluruh DPR ini ruang kerja yang paling buruk Pak, padahal salah satu tugas DPR ini adalah Legislasi Pak, ruang Banggar sangat bagus ruang Komisi-komisi sangat bagus, ini etalase kerja kita DPR dan ini yang paling buruk fasilitasnya Pak. Saya minta supaya ini kita menurut saya ini supaya diusulkan saja ke Pimpinan ini, terus kemudian juga penataan terhadap lalu lintas orang-orang disini, ini udah kayak kerja di pasar loak begitu siapapun boleh masuk, ya, kita nggak jelas lagi ini, ini kan kita mau ngomong konduvitas kerja kita juga berfikir membahas tenang dengan lalu lintas dan sebagainya, ini, mempengaruhi kinerja kita dan juga termsuk

fasilitas tadi ya, ini sebagai etalasnya DPR menurut saya ini harus benar-benar seriuslah ya, tidak lagi seperti ini Pak ketua, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mansinton.

Saya rasa langsung saja nanti ya sama Sekretariat nanti kita akan coba termasuk juga seperti yang disampaikan Pak Mansinton soal walaupun terbuka untuk umum tapi nanti memang teman-teman yang tidak ikut serta dalam pembahasan kita harapkan nanti berada di Balkon supaya tidak akan segera diperhatikan. Yang lain Pak? Silakan.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Ketua.

**Rekan-rekan Anggota Baleg yang saya hormati,
Selamat pagi,
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Disamping tugas Prolegnas artinya tugas kita bersama dengan Pemerintah nanti untuk menyusun program Legeslasi 2019-2020. Tapi yang penting juga yang harus menjadi perhatian dan fokus utama kita adalah soal Tata Tertib DPR ini Pak Ketua, karena ini menyangkut rumah tangga kita dan aturan main di kita karena sampai dengan sekarang ini karena ada tiga kalau tidak salah, empat Tata Tertib yang terpisah satu sama lain sehingga ini perlu ada sinkronisasi atau kompilasi dari Tata Tertib ini sehingga kita mempunyai di DPR ini mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama tentang bagaimana kerja tertib, cerdas tertib yang terstruktur di DPR.

Sehingga saya kira ini bahkan kalau perlu ini menjadi tugas awal kita Pak Ketua, sebelum kita melangkah yang lain-lain ini kalau Tata Tertib ini belum selesai bisa berantakan kita ini tanpa Tata Tertib. Selama ini kalau memang pemahaman yang samalah makanya kita bisa benar. Tapi saya kira secara normatif kita perlu selesaikan segera Tata Tertib ini mungkin tugas dari Tim Ahli kita untuk mengkompilasi dan kita putuskan segera di ruangan ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terim akasih.

Selanjutnya Pak Taubas.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih Ketua.

Pimpinan Sidang dan yang saya hormati seluruh Anggota DPR dari Badan Legeslatif,

Saya ingin mengomentari dua hal Ketua, yang pertama soal jadwal, dan yang kedua yang tidak terkait dengan substansi. Terkait dengan jadwal yang diajukan ini kami dari sebagai Poksi dari Fraksi Partai Nasdem khusus untuk yang point 7 hari Senin, 11 November 2019 kami ingin menyampaikan kalau bisa meskipun masih tentatif tanggal-tanggalnya tapi dijadikan catatan bahwa pada hari tersebut kami seluruh Anggota Fraksi Partai Nasdem itu sedang ada Kongres dan hari Ulang Tahun Partai Nasdem. Sehingga sangat sayang apabila pada hari itu ada agenda tapi tidak ada satupun Anggota Fraksi Partai Nasdem yang bisa menghadiri acara tersebut. Mohon dapat di geser waktunya atau di reschedule lagi sehingga kami dari Fraksi Partai Nasdem bisa menghadiri kegiatan tersebut.

Yang kedua Ketua, saya ingin menyampaikan hal yang tidak terkait dengan Jadwal, hanya usulan saja seperti kemarin yang disampaikan oleh Diah Roro Esti dalam Paripurna soal kita mengurangi penggunaan plastik, kita di hadapan kita ini ada botol plastik ya, kalau bisa kita pakai ini saja, botol gelas itu untuk dituangkan, seperti yang sudah terjadi di Komisi III pun sudah pakai itu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi usulan menyangkut soal jadwal kita di point 7 saya rasa ini tidak ada masalah karena tentatif yang penting sudah ada penyampaian kayak begini. Kita Insya Allah dalam kerangka kerja kita di Badan Legeslati kita pasti akan mengakomodir semua kepentingan teman-teman dari Fraksi-fraksi yang kita memang berbeda terutama menyangkut penyesuaian jadwal, dan saya pikir nanti ini menjadi catatan Pak.

Yang kedua, dari abang saya menyangkut soal Tata Tertib tadi memang Tata Tertib kita sebenarnya Cuma satu pak Cuma saat ini karena itu belum di kompilasi jadi ada 4 buku Tata tertib. Oleh karena itu menjadi tugas pertama kita dan itu sudah masuk bang didalam jadwal kita untuk segera kita bisa selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam Masa Persidangan awal kita ini sehingga Tata Tertib kita itu sudah terkompilasi dan tidak membuat kesulitan apakah itu Pimpinan DPR, Pimpinan Alat kelengkapan yang lain setiap hari harus membawa 4 buku hanya untuk membaca Tata Tertib, oleh karena itu tugas pertama kita.

Berikutnya mungkin saya ingin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Anggota Badan Legeslati karena kita hari ini kita sudah mengirimkan surat kepada AKD-AKD, Komisi-komisi untuk meminta masukan berkaitan dengan usulan Komisi yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang yang akan diajukan. Namun demikian perlu juga saya sampaikan bahwa setiap Anggota DPR berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, jadi boleh kita perorangan, boleh dari perorangan, boleh dari Fraksi, selamat datang Mbak Nurul, jadi boleh

dari Fraksi, boleh dari perorangan silakan diajukan dengan disertai syarat minimal harus ada Naskah Akademiknya dan draft undang-undangnya ada yang mungkin berkaitan dengan kepentingan Dapil silakan, Insya Allah mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan sinkronisasi dengan Badan Keahlian DPR dengan pihak Kesekjenan karena kita ini ada tumpang tindih dalam kerangka pelaksanaan tugas penyusunan. Karena di periode kemarin kita itu ada kemajuan di Badan Legeslasi, di periode sebelumnya Baleg itu tidak boleh menyusun apalagi membahas sebuah Rancangan Undang-Undang tapi Alhamdulillah dengan kesepakatan Fraksi-fraksi pada periode 2014-2019 akhirnya kewenangan itu untuk penyusunan dan membahas Rancangan Undang-Undang itu dikembalikan lagi kepada Badan Legeslasi yang dulunya sekedar hanya melakukan sinkronisasi dan pembulatan dan pematangan konsepsi, sekarang kita boleh melakukan itu.

Oleh karena itu kita berharap mungkin dari teman-teman dalam rangka untuk mempersiapkan kepentingan Dapilnya, kepentingan apa dan lain-lain sebagainya mungkin mau mengajukan silakan nanti akan kita masukan dalam program legeslasi nasional tapi intinya kita berharap bahwa jangan sampai nanti prolegnas kita seperti di masa-masa yang lalu itu membludak sampai 50 RUU sementara sebenarnya kita tidak sanggup untuk menyelesaikan baik karena diri kita maupun dengan ketidaksetujuan dari Pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan periode ini dengan sumber daya yang ada di Badan Legeslasi pada hari ini Insya Allah saya yakin kita bisa menyelesaikan semua yang masuk dalam program legeslasi nasional. Silakan Pak kalau masih ada?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Nama saya Guspari Gaus, dari Dapil II Sumbar, dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Anggota Baleg DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sudah membaca Rancangan jadwal yang diajukan oleh Pimpinan. Pada prinsipnya dan memahami apa yang diajukan ini. yang kedua adalah sebelum saya masuk kepada substansi untuk saya minta klarifikasi dan penjelasannya. pertama, saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan bahwa pelaksanaan rapat kita pada hari ini sudah agak lebih bagus dari kemarin. Kemarin kita rapat tertunda sekitar 35 menit, pada hari ini tertunda hanya 15 menit mudah-mudahan kedepan bisa tepat waktu karena kami-kami sudah berada di lokasi rapat di Baleg ini.

Berikut kepada pembahasan daripada jadwal acara rapat-rapat Badan legeslasi, pertama adalah mengenai point 4. Pada point 4 itu wawancara calon tenaga ahli Badan Legeslasi yang melakukannya adalah Pimpinan, saya memahami dan mengerti terhadap hal tersebut. tentu kami juga Pimpinan, saya tidak mau bicara nanti saya bicara apa yang Pimpinan sampaikan saja tahu yang Bapak Pimpinan sampaikan juga saya tidak faham. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah saya katakan bahwa kewenangan untuk melakukan wawancara saya dapat memahami siapa-siapa orangnya, dan kriterianya dan lain sebagainya tapi kami

berharap saya tidak tahu juga dalam Tata Tertib ini apakah itu hanya kewenangan dari Pimpinan untuk menerima, menyetujui orang-orang yang akan di wawancarai. Menurut hemat saya akan lebih elok kiranya dari sekian banyak orang yang di wawancarai lalu terpilih beberapa orang alangkah eloknya kalau diberikan pendapat, saran dan pengesahan bagi Anggota Badan Legeslatif itu saran yang pertama.

Yang kedua, adalah apa yang disampaikan Saudaraku dari Nasdem bahwa beliau mengusulkan bagaimana kalau tanggal , point 7 tanggal 11 itu karena memang ada agenda yang sangat luar biasa dan kita juga sangat memahami dan saya sangat menyetujui setiap ada agenda-agenda partai dari partai manapun kalau ada jadwal yang sudah ditetapkan itu untuk dikosongkan. Artinya adalah tidak hanya pada satu partai saja tetapi partai yang ada didalam ini kalau ada agenda-agenda yang seperti itu kita berikan waktu yang longgar untuk bisa dilakukan apresiasi sehingga jangan dijadwalkan kegiatan pada agenda partai yang lakukan kegiatan itu. Jadi ini menurut saya Pimpinan menjadi keputusan kita, jadi sifatnya adalah bukan hanya bersifat parsial tetapi untuk seluruh partai.

Berikutnya adalah Point 10 itu ada rencana kegiatan tentang Kunker. Kunker itu dibagi ke bebrapa daerah saya mohon minta penjelasan karena ada 6 daerah kunjungan yang akan kita lakukan, teknisnya ini bentuknya bagaimana, apakah kita diminta untuk memilih salah satu diantara itu atau memang kita rombongan hadir ke semua yang telah ditetapkan ini. Maaf saya baru disini jadi tentu saya ingin tahu juga Tupoksi dari persoalan terhadap persoalan yang saya sampaikan. Barangkali itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kedepan kita lebih bisa mendisiplinkan lagi terhadap apa yang pernah saya sampaikan kemarin.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gus.

Saya melakukan gembira sekali suasana Baleg sepanjang tahun bisa seperti ini , ini luar biasa, saya jawab dulu Pak ya. Yang pertama kita berharap mudah-mudahan karena ini kan tugas di Komisi dimana apa ya Jadwal di Komisi ini belum saling tabrak-tabrakan ini, jadi suasananya memang seperti ini. Tapi kalau memang bisa fokus di Badan Legislasi, saya pstikan Pak Badan Legislasi itu disamping tempat kita mengambil keputusan ini tempat yang baik untuk belajar soal Program Legislasi karena semua rancangan Undang-undang Usul inisiatif DPR tidak ada satupun yang tidak kita bahas di Badan Legislasi. Jadi pengetahuan Perundang-undangan kita pasti akan diasah disini. Namun demikian kita kan tidak sekedar hanya berada di Badan Legislasi, kita ada tugas di Komisi, nanti Bapak sendiri nanti yang akan mengalami kesulitan mengatur jadwal, tapi kadang kala kita berharap betul mudah-mudahan saya berharap Anggota Badan Legislasi bisa *full* seperti ini di masa-masa persidangan yang akan datang.

Yang kedua soal kunjungan pak, soal Kunjungan nanti Bapak berkoordinasi dengan Kapoksinya masing-masing. Jadi sekretariat sudah mengirim surat kepada Poksi masing-masing

silakan Poksinya untuk mengatur anggotanya yang mau kemana, kemana kemana jumlah orangnya juga sudah ditentukan jadi satu daerah sekian orang itu sudah ditentukan yang mengatur itu bukan Pimpinan tetapi adalah poksi dari fraksi masing-masing.

Yang ketiga adalah menyangkut soal Tenaga Ahli, Tenaga Ahli itu Pak diatur didalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009, saya bacakan Pasal 17 nya. Ayat (1) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan melakukan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli alat Kelengkapan Dewan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4). Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan menentukan nama calon Tenaga Ahli, Alat Kelengkapan Dewan yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang dimaksud, jadi saya juga punya pengalaman, kami-kami ini punya pengalaman Pak Ibnu dan beberapa teman yang Periode yang kemarin, karena berhubung Tenaga Ahli kita kan ini sudah ada Pak, dan semua mendaftar juga, ya kan semua mendaftar juga mungkin dari sisi penilaian kinerja nanti yang bisa kita pertahankan tetap akan kita angkat, karena kan kinerjanya sudah terlihat. Saya dengan Periode kemarin menjadi beban Badan Legislasi tidak ada satu pun TA yang saya bawa karena menggunakan seluruh TA yang sudah ada karena mencari Tenaga Ahli di Badan Legislasi tidak seperti kita mencari Tenaga Ahli yang mendampingi kita sehari-hari karena pasti harus punya pengetahuan *Legal Drafting* yang cukup kuat karena merekalah yang akan menyusun kemudian kita yang mengambil proses pengambilan keputusan Politiknya baik penyusunan penyempurnaan dan lain-lain pasti TA yang akan mengerjakan.

Namun usulannya pasti akan kita tampung Pak, demikian Pak ya. Dan terakhir mungkin berkaitan dengan jadwal sekali lagi, ini tentatif Pak, karena kita sudah tentukan hari ini kita RDPU dengan RDP dengan Menkopolkam atau dengan yang lain tapi hari ini kita harus menyesuaikan jadwal dengan mereka-mereka juga sama dengan kita, jadi makanya saya bialng pasti tentatif, silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Interupsi sebentar.

berkaitan dengan apa yang dijawab terhadap pertanyaan yang saja ajukan. Mengenai duplikasi rapat pada waktu dan jam yang sama, ini Pimpinan mengatakan tadi merasa gembira terhadap kehadiran kita pada hari ini. Pengalaman kami di daerah Pimpinan, itulah fungsi daripada Badan Musyawarah dulu, bagaimana Badan Musyawarah bisa mendistribusikan waktu itu saya rasa tidak jauh berbeda di daerah juga ada namanya Komisi, ada Badan Anggaran, ada Badan Musyawarah dan lain sebagainya.

Oleh karena itu peran daripada Badan Musyawarah dalam menentukan waktu itu sangat penting. Oleh karena itu saya sangat berharap karena saya berada juga di Komisi II ada teman-teman kami banyak yang hadir disini, tolong juga ini diberi perhatian ini catatan buat Pimpinan untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah agar dalam menyiapkan, menetapkan jadwal itu jangan terjadi paralel kegiatan pada AKD yang berbeda itu saran yang pertama.

Yang kedua, permintaan saya terhadap apa yang dikatakan Nasdem tadi belum juga ini merupakan keputusan bagaimana apa yang disampaikan oleh Nasdem merupakan presiden bagus bagi kita untuk dijadikan keputusan dalam menetapkan jadwal.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya pikir sudah Pak ya. Jadi tadi soal Nasdem sudah kita jawab, pokoknya kita akan sesuaikan pak, silakan Pak.

F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A)

Terima kasih.

Bapak Ibu sekalian,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan,

Disini ada orang-orang besar ada Pak Supratmen ini, WR. Supratman ya, Pak Multazam, Pak Ibnu, Pak Willy sahabat-sahabat kami dan teman-teman Anggota Badan Legeslasi yang saya hormati. Sebagai pendatang baru *newcomers* ini Pak walaupun saya kenal baru sudah lama. Saya dari, nama saya Bukhori dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tenggal dan juga Kota Salatiga ini Dapil baru saya, dapil baru yang lama diambil Pak Ishak Meki.

Bapak/Ibu sekalian,

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa selama kita bersama-sama untuk bekerja dalam sebuah suatu Badan Legeslasi untuk diri saya dan teman-teman, saya mendapatkan suatu suasana baru apalagi suasana semangat yang luarbiasa ini mudah-mudahan bisa memberikan pembentukan pribadi kepada kita semua khususnya kepada saya sendiri. Yang kedua, saya ingin mengendors apa yang disampaikan oleh Bang Mansinton tadi itu menciptakan ruangan dan suasana yang kondusif saya kira menjadi penting sehingga memang yang berkepentingan itulah yang ikut melaksanakan atau ikut melakukan satu rapat-rapat bersama dengan Badan Legeslasi. Yang kedua, terkait dengan kegiatan pak, sekaligus menyampaikan bahwa pada tanggal 14-16 ini juga kebetulan di Partai Keadilan Sejahtera itu juga sedang memiliki Rakornas yang tentunya semua Anggota Dewan yang ada di DPR ini terlibat sehingga nanti ketika pas disini ada kunjungan atau kegiatan pada tanggal 14, tanggal 13 sampai 16 nanti mohon pengertiannya supaya kemudian bisa disesuaikan. Dan sekaligus saya sampaikan kepada Kapoksinya Pak Muzzamil agar nanti didalam penyusunan kegiatan untuk kunjungan disesuaikan agar tidak bentrok dengan kegiatan partai.

Yang ketiga, setahu saya didalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu fungsi Badan Legeslasi selain merancang dan juga melakukan harmonisasi maka juga memiliki fungsi sosialisasi. Kami mengusulkan supaya sosialisasi terhadap masalah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada ini tolong kemudian juga diberikan kesempatan kepada Anggota tidak nanti hanya berhenti pada Pimpinan, supaya masing-masing sesuai dengan kewenangan dan terutama terkait dengan masalah Dapil. Jadi ini saya kira penting supaya nanti ada program tentang sosialisasi undang-undang terutama kemudian sudah disahkan oleh DPR, itu yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan masalah ini dijadwal pada tanggal 13 ini, terkait dengan rancangan pembentukan Omnibus Law saya kira makhluk omnibus law inikan bagi kita makhluk baru, karena biasanya inikan terjadi untuk negara-negara yang dari *common white* sementara kita inikan menganut hukum sipil. Jadi ini karena persoalannya adalah masalah baru sebelum kita melakukan, mengundang misalnya dari berbagai macam mitra Menkopolkam dan seterusnya sebaiknya di Badan Legeslasi ini melakukan satu pertemuan terlebih dahulu menetapkan konsep omnibus law yang kita maksudkan seperti apa agar kita tidak kemudian hanya mendapatkan dikte dari pemerintah karena ini kemudian sesuatu memiliki masalah besar tapi juga bisa membuat moderat, kalau saya mengibaratkan seperti ini jadi konsep terkait dengan masalah omnibus law ini ibaratnya kalau do'a ini rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar jadi inikan selesai semua ini pak. Kalau kemudian semuanya bisa disapu jagat seperti itukan kemudian repot tapi bisa jadi menjadi masalah begitu. Karena itu keterkaitan-keterkaitan ini perlu harus dirumuskan terlebih dahulu di tingkat legeslasi, di Badan Legeslasi harus memiliki satu konsep karena ketika kita menghadapi mitra ini sebenarnya kitakan juga menghadapi antara DPR dan Presiden jadi bukan Fraksi-fraksi dan Presiden jadi saya mengharapkan supaya kita memiliki konsepsi yang kalaulah tidak sama memiliki konsepsi yang memiliki kesamaan banyaklah agar ketika kita bersama dengan mitra itu bisa menemukan satu kesepakatan apa yang kemudian diharapkan agar tidak kemudian kita tidak tahu misalnya berbagai macam proses legeslasi selama ini yang berjalan itukan salah satu contoh munculnya gagasan itukan dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan berbagai macam lapangan kerja.

Setahu saya di periode 2014-2019 kemarin ada salah satu rancangan yang cukup menarik yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional dan itu saya kira merupakan satu jawaban sebenarnya. Tetapi kenapa kemudian belum sampai diselesaikan muncul mahrab baru. Jadi saya pikir ini perlu saya mengusulkan supaya ada agenda untuk pembahasan tentang masalah konsep dan susunan tentang omnibus las.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke Pak Sodik saya kembali ke Tatib habis ini Pak Sodik ya.

F-GOLKAR (ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si)

Terima kasih Ketua.

Nama Zulfikar Arse Sadikin A-315 Fraksi Partai Golkar, Daerah pemilihan Jawa Timur III Banyuwangi, Bondowoso Situbondo.

Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi yang saya hormati,

Mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua, menyindir apa yang diutarakan oleh Pak Mansinton dan menyambung apa yang diutarakan oleh Pak Bukhori saya melempar wacana saja agar kedepan dalam menyusun Prolegnas baik prolegnas 5 tahun terlebih prolegnas prioritas 1 tahun Badan Legeslasi kita semua benar-benar memikirkan dengan sebuah alasan yang jelas apakah memang sebuah undang-undang itu harus dihadirkan, apakah memang sebuah undang-undang itu harus di revisi, apakah kehadiran undang-undang dan revisi undang-undang tersebut memang menjadi solusi, memang menjadi kebutuhan baik bangsa maupun masyarakat.

Sehingga apa yang dilakukan oleh Baleg terlebih ketika Baleg punya kewenangan tambahan dan itu memperkuat Baleg mengedepankan penyelesaian RUU yang berkualitas, orientasinya bukan jumlah yang banyak. Berdasarkan pengalaman kita selalu membuat prolegnas terutama prolegnas tahunan itu mencapai 50. Tapi pengalaman menunjukkan kita jarang mampu menyelesaikan 50 RUU itu bukan begitu Pak Ketua ya tadi sudah disampaikan jadi saya setuju dengan disampaikan oleh Ketua tadi. Kalau berdasarkan undang-undang MD3 masing-masing Komisi dalam Masa Sidang itu bisa membahas dua Rancangan Undang-Undang kalau tidak salah begitu Ketua, kalau 2 x 11 berarti 22 kenapa tidak itu yang kita pakai? Menetapkan prolegnas 1 tahun, prolegnas prioritas ya dua-dua saja atau walaupun mau ditambahkan mungkin 22 terlalu sedikit begitu ya ditambahkan memang realistis bisa kita kerjakan begitu. Kalau 5 tahun yang lalu tidak pernah berhasil ditambahnya 10 lah jadi 30 berapa, 32 atau 30 lah begitu.

Kalau itu bisa kita lakukan Insya Allah kedepan DPR khususnya Badan Legeslasi akan bisa dikatakan mencapai target dan punya prestasi karena mampu menyelesaikan Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh Prolegnas. Sehingga citra DPR terutama Baleg semakin baik di mata publik begitu. Saya kira itu yang saya sampaikan Ketua mudah-mudahan bisa dimengerti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan beserta Rekan-rekan,

Anggota Badan Legeslasi yang saya hormati,

Ijinkan memperkenalkan diri, saya Sodik Mudjahid DaKota Bandung, Kota Cimahi sama Teh Nurul Arifin. Beberapa hal yang disampaikan terutama Pimpinan mohon maaf terlambat khususnya ke Pak Agus mohon maaf terlambat pak, fraksinya belum ya mohon maaf pak, dengan Romo saya dari Fraksi Gerindra bersama Pimpinan juga. Pak Agus, mohon maaf terlambat karena ada rapat di Komisi II dan mungkin Pak Agus juga akan mengalami seperti itu Pak ya, jadi ada hal yang memang tidak bisa diatur di tingkat Bamus kenapa? Karena begitu tepatnya jadwal di Komisi dan Badan-badan mohon maaf atas keterlambatan itu.

Yang kedua, Pimpinan sebelum kita melangkah jadwal ke hari Senin tentang Prolegnas mohon informasi barangkali ada catatan di Badan Legeslasi tentang undang-undang kemarin yang harus kita lanjutkan, entah berapa jumlahnya syukur-syukur dengan jenisnya yang bisa diinformasikan kepada kami. Yang kedua, barangkali saya kurang mendapatkan informasi selama 5 tahun kemarin dalam prolegnas itu ada tidak pak Rancangan Undang-Undang inisiatif perorangan Anggota DPR ada atau tidak mohon diinformasikan kepada kami.

Yang terakhir Pimpinan yang saya hormati, memang masalah kecil soal Kunker ini kami kurang jelas apakah memang ada 3 group dengan masing-masing dua sasaran atau ada 6 sasaran untuk semua Anggota Badan Legeslasi sehingga kita akan berkunjung ke tempat-tempat tersebut, mohon penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

F-GOLKAR (NURUL ARIFIN):

Terima kasih Bapak Supratman.

Dan yang saya hormati jajaran Pimpinan,

Ini saya ingin menambahkan apa tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ustadz Bukhori tentang membahas rencana pembentukan Omnibus Law ini dalam Prolegnas. Kita memang, saya sepakat sekali kita butuh dulu komitmen atau kesepakatan bersamalah bagaimana prespektif tentang Omnibus Law ini karena kalau mengutip Pidatonya Presiden hanya 2 Undang-undang saja yang beliau tekankan yaitu Undang-Undang cipta Lapangan kerja dan Undang-undang pemberdayaan UMKM. Namun kalau saya lihat disini Undang-undang Rakernya itu

mencakup Menko Polkam, Menko Ekuin, Kepala Bappenas, dan Menkumham . Apakah hanya akan membuat 2 Undang-undang ini untuk menjadi satu kemudian Undang-undang yang sudah dihapuskan atau seperti apa, atau adakah Undang-undang lain yang akan diintegrasikan menjadi satu Undang-undang baru begitu, jadi ini membutuhkan satu pemikiran berama karena nanti supaya kita tidak gelagapan kita ketika ketemu Mitra kerja begitu.

Dan yang kedua di luar semua pembicaraan tentang Substansi Baleg ini saya masukan Ketua, ini Anggota Baleg ini saya kira memang paling banyak di bandingkan Komisi-komisi. Namun menjadi sangat tidak nyaman ketika tempat duduknya itu, ini dempet-dempetan begitu, saya tidak tahu semasa nanti resee usulah Bapak Ketua, apakah ruangnya di perluas atau kursinya mungkin mejanya diperkecil karena ini untuk gerak saja susah begitu, sementara Baleg ini kan jantungnya parlemen begitu, kita harus nyaman lah ya, di bandingkan Komisi lain yang terang, yang dingin yang apa, disini tiba-tiba menjadi pengap begitu, jadi sekalian curhat ini, karena kami dari Golkar tidak ada di Unsur Pimpinan, jadi saya harus berbicara di floor seperti ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hendrik, habis itu Mas Putra.

F-GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati seluruh Anggota Baleg,

KETUA RAPAT:

Sebelumnya anu ya saya perpanjang dulu ya, izin kita perpanjang sampai 12.15 wib ya.

(RAPAT: SETUJU)

Silahkan Pak Hendrik.

F-GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M)

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Terkait dengan Kunker Pimpinan, saya melihat ini daerah tujuan Kunker itu semuanya masuk di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Usul konkrit saya Pimpinan, kalau bisa masukan satu wilayah Indonesia Timur lebih konkrit lagi masukan saja Maluku Pimpinan. Kenapa Pimpinan? Supaya jika ada Anggota Baleg dari Komisi VIII sekaligus bisa melihat korban gempa disana. Gempa bumi yang terjadi di Maluku Pimpinan itu sudah 1800 kali guncangannya dan tidak mendapat cover yang fair. Andaikan peristiwa itu terjadi di Solo atau di Yogya saya yakin betul itu akan mendapatkan liputan berita yang luarbiasa. Tapi karena terjadi di Maluku maka sepertinya media kita juga berlaku tidak adil terhadap bencana di daerah-daerah yang lain. Saya kira itu usul konkrit saya Pimpinan.

Yang kedua Pimpinan sebagai orang baru di DPR saya ingin *new kids on the block* Pimpinan, saya rindu juga bisa mengenal para senior-senior saya di ruangan ini , jika berkenan Pimpinan gunakanlah sedikit waktu untuk kita saling memperkenalkan diri.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik Pimpinan, Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam damai sejahtera untuk kita semua,

Merdeka.

Pertama-tama sya mengucapkan selamat kepada Pimpinan dan kita semua yang ditugaskan dan dipercaya untuk berada Badan Legislatif, Badan Legislasi maksud saya. Yang kedua Pimpinan, saya menyampaikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Andreas tentang tata tertib, saya lihat tata tertib ini justru ditaruh di jadwal yang paling bawah. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dan menyampaikan sikap Badan Legislasi ke masyarakat, Pagi ini Pimpinan, saya kebetulan bukan hanya suka posting di Media Sosial, tapi kebetulan masih suka baca koran, jadi saya buka koran halaman 2 berita paling pojok dibawah tulisannya DPR akan batasi jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional. Saya kalau tidak salah tugasnya itu di sebelah, jadi ketika Pimpinan kemarin terima palu dari Pak Aziz, baru saya pulang ke sebelah, saya tidak ingat kita membahas soal ini apakah memang kita sudah sepakat bahwa produk Undang-undang yang akan kita telurkan itu hanya 30 sampai 35 jangan-jangan seperti doa Pimpinan, nanti sampai akhir tahun, akhir masa jabatan kita rajin seperti ini semua, jangan-jangan tembus 50, siapa yang tahu. Tapi dalam berita itu, tentunya Pak Ketua yang dikutip, Pak Ketua sudah menyatakan bahwa target Prolegnas tahun kedepan akan dibatasi menjadi 30 sampai 35 ini mungkin menjadi masukan dari kita semuanya, saya tidak mengatakan saya tidak setuju atau setuju, karena tentunya saya juga masih berkonsultasi dengan kapoksi saya Pak Sturman dan juga senior yang ada disini, tapi maksud saya mungkin dalam konteks kita menyampaikan kepada masyarakat ada baiknya Pak Ketua, Pimpinan kita bahas dulu disini apalagi seperti tadi doa Pimpinan agar kita juga hadir di setiap

rapat disini dalam jumlah yang banyak. Saya khawatir nanti jangan-jangan doa itu betul-betul terwujud, rajin semuanya dan kita bisa menembus *record*. Jadi mohon ijin Pak Ketua mungkin karena saya aorang baru gitu ya jadi mungkin masih ada semangatnya, jangan-jangan bisa tembus 50 siapa tahu begitu ya. Jadi tolong dalam konteks ini mungkin kita juga dalam berkomunikasi karena judulnya itu ngeri Pak Ketua, judulnya itu DPR langsung, bukan Baleg dibilang DPR, sudah menyepakati, saya baru dengar ini tadi Pak Ketua ngomong bahkan rekan saya yang tadi ngomong di sebelah saya masih ngomong mungkin kita tidak bisa 50 bisa kita kurangi jadi apakah ini sudah keputusan atau ini sudah masih kita bahas. Saya rasa itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka.

KETUA RAPAT:

Pak mungkin begini ya jadi supaya bagus kita sahkan dulu Jadwalnya baru kita berdiskusi, kan ini soal Jadwal saja jadi kalau tidak keberatan kita putuskan jadwalnya dulu kepada masing-masing Fraksi dan kita berdiskusi soal hal-hal yang seperti tadi ya, saya ingin menyampaikan menanggapi dulu mas Putra dulu tadi, menyangkut soal Prolegnas, Prolegnas itu menjadi keputusan 3 lembaga pak, berapa yang masuk pasti kita akan kita melakukan rapat 3 lembaga negara DPD, Pemerintah dan DPR, DPD itu diwakili Panitia perancang undang-undang DPD, DPR diwakili oleh Badan Legislasi dan Pemerintah diwakili nanti Menkumham atau ada kemungkinan kalau tiba-tiba Badan Legislasi Nasional itu dibentuk oleh Pemerintah kita belum tahu. Sekaligus menjawab soal Omnibus Law tadi kenapa kita mengundang Pemerintah dulu, karena kan yang punya ide kan Pemerintah, kita ini semua buta saya sendiri buta ini yang mana in ya lebih bagus kita dengarkan sebelum kita memutuskan Prolegnasnya, kita setuju atau tidak keputusan politiknya ada di kita Pak, kalau saya tidak mengatakan ada di fraksi kan di kita di Badan Legislasi. Jadi mau Omnibus Law di terima atau tidak ya di DPR ini yang menentukan juga, boleh pemerintah usulkan, kita juga boleh usulkan tapi kalau Pemerintah tidak setuju kan nggak jadi.

Berkaitan soal yang terakhir tadi menyangkut soal jumlah target legislasi sebenarnya tidak ada masalah tetap boleh kasih 1 Komisi I pun, kan setiap 3 bulan kita boleh melakukan evaluasi terhadap Prolegnas. Jadi selama inikan yang terjadi banyak 1 Komisi minta sampai 3, 4, 5 akhirnya satupun tidak selesai, kita batasinya bukan berarti membatasi kewenangan komisi untuk atau Anggota untuk melakukan pengajuan rancangan Undang-undang tapi kita membatasi supaya kalau selesai dulu 1 baru dilanjutkan berikutnya 1 lagi, tidak seperti selama ini akhirnya kita Badan Legislasi sepertinya kita yang bertanggung jawab padahal Baleg itukan membahas Undang-undang sangat terbatas bahkan kalau boleh kita katakan kemarin dari sekian Rancangan Undang-undang yang berhasil diahkan kita Badan Legislasi mencapai rekor Pak ya Pak Andreas ya, kita mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang dalam waktu yang sangat relatif singkat, ya Pak Jenderal ya Pak. Jadi oleh karena itu sekali lagi menyangkut soal ini itu keputusan politik kita Pak, saya kadang kalau mungkin media

kan bisa maklumi kalau kadang kala kita yang berbicara kadang kala itu merepresentasikan lembaga dan ini saya harap juga nanti menjadi koreksi bagi kami Pimpinan untuk lebih berhati-hati dalam membuat *statement*. Saya rasa begitu, jadi sekali lagi saya minta persetujuan kepada Bapak Ibu sekalian apakah jadwal kita pada pagi hari ini.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Pimpinan, Interupsi Pimpinan. Saya Al Muzzamil Yusuf.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Masukan dari Fraksi kami termasuk Fraksi Nasdem saya kira harus menjadi konsideran untuk perbaikan jadwal. Saya kira itu jadi jangan diketok yang ada di tangan kita saat ini.

KETUA RAPAT:

Jadi jadwalnya tentatif Pak, jadi nanti setelah ini kita akan sesuaikan dengan Sekretariat, jadi jadwalnya masih tentatif. Silakan.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Boleh saya lanjutkan Pimpinan, yang lain-lain saya kira pada point 3 tentang masukan Prolegnas itu kan Narasumbernya ditulis satu ya, kami menyarankan PSHK saja Narasumber kita, kami menyarankan dalam forum ini kita undang Ormas besar NU, Muhammadiyah dan lain-lain. karena mereka ini juga yang banyak memberikan masukan kepada kita dalam perjalanan. Yang ketiga point 4 tadi Pimpinan telah membacakan dalam undang-undang kita wawancara calon Tenaga Ahli Badan Legislasi jika yang diseleksi adalah Tenaga ahli yang lama kami setuju itu, Pimpinan saja tidak masalah kalau memang itu semua Tenaga Ahli yang lama. Tapi kalau ada calon-calon yang baru pengalaman yang baik 2004-2009 seleksi Tenaga Ahli melibatkan wakil Fraksi-fraksi selain Pimpinan ada wakil Fraksi-fraksi jika memang ada pendaftar baru, tapi kalau untuk pendaftar lama, saya setuju dengan Pimpinan tadi untuk Tenaga Ahli Baleg ini tidak mudah mencari orang baru, karena kemampuan pembahasan RUU, saya tidak tahu ini ada orang baru atau orang lama, jika ada orang baru saran kami mohon ada suatu wakil dari setiap Fraksi untuk dilibatkan, praktek yang bagus saya kira ya tanpa kita melanggar Undang-undang, Putusan bisa tetap Pimpinan tapi Fraksi-fraksi bisa memberikan masukan karena fraksi kami tidak terwakili dalam Pimpinan, itu yang berikutnya.

Selanjutnya pada Jadwal nomor 6 pada hari Kamis Narasumber terkait penyusunan Prolegnas tahun 2020-2024 saya kira Narasumber tidak hanya satu, kami juga dalam forum ini mengusulkan Doktor Muzzakir yang banyak memberikan masukan di beberapa Komisi terkait Hukum Pidana saya kira bisa dimasukkan, karena baru satu nama disini Prof. Maria. Berikutnya yang juga menjadi hal penting adalah dalam Undang-undang P3, (penyusunan dan perubahan perundang-undangan) Putusan MK selama ini Pimpinan tidak dimasukkan didalam Narasi Undang-undang yang lama, saran kami perlu difikirkan ketika ada Putusan MK menyangkut

pasal, atau ayat atau apa perlu kita masukkan dalam Undang-undang P3 atau yang lain, itu apakah kita sebut diberi *boxmail* bahwa itu sudah karena banyak sekali Putusan-putusan MK yang kita tidak tahu itu telah dirubah, ini saran kami terkait dengan wilayah kita karena kita kan melakukan *review*, sosialisai dan *review* perundang-undangan yang ada. Saran kami ada satu pasal yang perlu kita masukkan, mungkin, mungkin di Undang-undang P3 setiap Pasal yang telah ada yudisial reviewnya maka pemuatan berikutnya oleh pihak Pemerintah dalam hal ini membawahi perundang-undangan dia sudah ada perubahan saya nggak tahu tehnisnya, apakah warna ataukah apa ataukah catatan ya karena banyak sekali putusan-putusan yang tidak diketahui bahkan kita mendiskusikan disini saya ingat, nggak tahu kita itu sudah di rubah oleh MK, demikian beberapa catatan kami kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-NASDEM (HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H., LLM):

Interupsi Pimpinan.

Mohon ijin, Hillary Brigitta Lasut Fraksi Partai Nasdem. Sedikit menambahkan mungkin. Sedikit menambahkan untuk masukan di RDPU sepertinya disetiap point tidak ada yang melibatkan Narasumber dari LBH dan dari Mahasiswa atau stake holder pendidikan. Padahal setelah ada usulan untuk pengesahan undang-undang ataupun undang-undang yang tidak disetujui yang paling banyak bersuara di media dan melakukan demonstrasi adalah dari Mahasiswa dan dari LBH sehingga siapa tahu kita bisa melibatkan LBH dan stake holder pendidikan Mahasiswa dan organisasi juga boleh sehingga kedepannya tidak ada lagi yang seperti kemarin, seperti KUHP.

Terima kasih.

Tambahn juga, untuk Kunker tidak ada daerah perbatasan disini kayaknya yang tujuan-tujuan untuk kunker daerah perbatasan seperti Kabupaten kepulauan Taut dan Sangiah itu tidak ada padahal Badan Legeslasi juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat dari daerah perbatasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH/F-GERINDRA):

Kalau tantangan Mbak Hillary ini, ini bisa dijawab Ibu Hillary ini bisa kita jawab, kunjungan berikut kita akan coba bersama-sama ke Talaut. Problemnya yang ingin saya sampaikan jadwal Masa Persidangan kita ini sangat terbatas dari sekarang ini sampai 12 Desember Pak dengan berbagai macam kegiatan yang ada didalam ini termasuk kunjungan kerja kalau kita kunjungan kerja berarti tidak ada kegiatan kita pak, di Parlemen ini, di Badan Legeslasi harusnya tidak ada kegiatan. Oleh karena itu nanti ini Sekretariat akan menyesuaikan kembali dengan usulan-usulan termasuk yang disampaikan oleh Pak Muzzamil tadi menyangkut soal kegiatan teman-teman PKS, Nasdem supaya kita bisa kebersamaan itu bisa kita jalani.

Yang terakhir soal menyangkut putusan MK, memang didalam kitakan prolegnas itu hanya mengenal dua tetapi ada komulatif terbuka, kami sudah di tingkat Pimpinan kemarin membicarakan kita akan memaksimalkan waktu kita untuk mengusulkan perubahan, karenakan

kadang kala putusan MK itu tidak membuat norma, kalau dia mencabut tapi kan tidak boleh langsung menghapuskan didalam undang-undang itu menjadi tugas DPR bersama pemerintah. Oleh karena itu walaupun satu pasal yang berubah proses penyusunannya tetap sama dengan mau berapa pasalpun dan itu kita sudah lakukan kemarin di undang-undang perkawinan itu satu pasal pak. Tapi prosesnya mulai dari penyusunan NA, draftnya, harmonisasinya sama dengan KUHP yang sekian ratus pasal. Oleh karena itu tapi itu akan segera menurut saya itu akan tertib sehingga nanti kordinasi Pak Muzzamin nanti kita akan dengan BKD kita akan undang bersama dengan Kesekjenan jelaskan semua mana yang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang untuk segera kita perbaiki. Sehingga itu bisa menambah produktivitas kita dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang saya rasa itu pak ya. Silakan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Terima kasih Pimpinan.

Karena kami baru ijin kan saya memperkenalkan diri, Nama Syamsurizal dari Dapil Riau I dari Partai PPP.

KETUA RAPAT:

Ini sampai 12.30 wib pak ya kita minta ijin ini. Terima kasih Pak Romo.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M)

Hanya saja koreksi jam-jam Pimpinan karena jam kami jam 12.10 wib ini sudah jam 12.18 wib barangkali kita samakan dulu jamnya. Ijinkan kami melanjutkan Pimpinan, Badan Legeslasi adalah badan yang memang menjadi kerja utama, gayung utama daripada Dewan kita ini karena tugas-tugas Legeslasi, Anggaran dan Pengawasan dan kita Banggar jadi Anggota Badan Legeslasi DPR. Tapi perlu kita catat adalah pos di ruang lingkup pekerjaan Legeslasi ini hampir mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dari 11 Komisi yang ada ditambah lagi materi yang mungkin diusulkan oleh DPD bahkan ada hak inisiatif dari Anggota Dewan sendiri.

Oleh karena itulah karena luasnya ruang lingkup sementara kita dimintakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada daerah, kepada Pimpinan, kepada Presiden kita, dan kepada Allah SWT. Karena kebenaran materi dari apa yang kita susun dan itu akan menjadi pedoman dan pegangan dari Anggota masyarakat kita. Oleh karena itu barangkali kami ingin mengusulkan kira-kira bentuk bagaimana bekal yang diberikan kepada kita Anggota Badan Legeslasi ini yang jumlahnya 80 orang dikatakan oleh teteh Nurul bahwasannya ini yang terbanyak dari sekian banyak kerja yang ada disini. Ya, kita tadi satu diantaranya adalah kita akan diberikan semacam masukan dari Menko, dari Kementerian Dalam Negeri ataupun dari Komisi. Tapi barangkali apa kita akan tertangkap semua.

Oleh karena itu saran kami mungkin kita perlu mencari satu macam metoda untuk peluasan materi sehingga bahan yang kita bahas dan itu akan digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam keseharian mereka itu bisa kita pertanggungjawabkan. Saya ambil contoh satu saja karena kami dari Komisi II saya coba-coba membaca tentang undang-undang pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 19 Tahun, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

yang lalu. Undang-undang pemerintah daerah ini banyak sekali mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Nomor 4 Tahun 1949 terus Nomor 22 Tahun 1951 dan 57 dan sampai Nomor 18 Tahun 1965, 574, 22, 99 kemudian terakhir adalah undang-undang Nomor 23 tahun 2015, dan Undang-undang ini ternyata dalam ketentuan yang diatur itu bertentangan dengan yang sudah, kejelimatan ini yang ingin saya sampaikan sampai sejauh mana kita bisa mempertanggung jawabkan Undang-undang yang sudah berlaku lama, tetapi bagian-bagian pokoknya telah kita bawa sampai Undang-undang yang berikutnya karena kurang jelimat Undang-undang yang terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, ternyata tidak sejalan dengan apa yang disebut Undang-undang sebelumnya, tanggung jawab siapa, yang ingin kita kedepan barangkali secara materiil substansi dari Undang-undang itu musti kita kita kita sepakati bagaimana caranya terutama yang menyangkut peristilahan ataupun substansi dari hukum yang dibawakan dengan peraturan yang baru itu, itu satu.

Yang kedua kami tadi menyampaikan apa yang mendengar apa yang disampaikan beliau cukup bagus misalnya mengusulkan dari aspek jumlah, misalkan Komisi cukup 2 yang dianggap prioritas mengajukan undang-undang tapi tetap 2 sudah 22 ditambah lagi DPD dan jumlah cukup banyak, barangkali ini patut kita sepakati kira-kira langkah kita kedepan itu apa, jadi perlu strategi untuk kedepan, karena target juga menjadi ukuran keberhasilan Badan Legislasi, kemudian yang terakhir.

Kami ingin sedikit mengomentari apa yang dikatakan oleh Pimpinan kami terdahulu barangkali yang saya lihat dari ini karena catnya warna gelap semua karena waktunya sangat singkat tadi diusulkan Reses ini kita gunakan untuk semacam memperbaiki ini saya usulkan barangkali dicat warna terang mungkin diatasnya mau bagaimana karena kalau kita mau ,mau buat baru barangkali mungkin akan makan waktu. Jadi yang kedua soal pencahayaan saya sekarang ini soal teduh kita bisa rapat membahas yang sangat jelimet barangkali jadi saya setuju mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi peru kita benahi sedikit ruangan ini, barangkali catnya sudah gelap semua, mejanya gelap, dinding juga gelap, lampunya juga kurang terang , jadi ini saya tinjau sya kir aini yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam.

Jadi memang mungkin begini Pak ya, tadi soal ruangan tidak ada masalah, kita sudah ke Sekretariat sudah dimintakan pada masa Reses ini itu akan segera kita ada penyesuaianlah. Prinsipnya mungkin kemarin ini, ini sengaja di cat gelap ini pak, karena Ketua Balegnya kulitnya juga agak gelap pak, saya khawatir ini jadi prinsipnya begitu. Jadi Insya Allah ini akan segera kita sesuaikan Cuma memang Pak kadang kala itu di Badan Legeslasi nanti bapak akan lihat kadang kala ada undang-undang yang perlu dasarnya khusus, kadang kala ada tiba-tiba pemerintah mau, Presiden mau, DPR mau ini, itu penugasannya dimana dan kadang kala masa

Reses pun di Baleg pun ikut Sidang nanti itu kadang kala menyesuaikan yang keinginan-keinginan itu kadang kala sulit. Kita berapa kali masa reses kemarin dari kemarin kita malah sidang.

Oleh karena itu sekali lagi menyangkut soal ini kita ruangan ya saya rasa tidak ada masalah dan akan segera dikerjakan di masa Reses yang akan datang. Saya dan teman-teman disini pada menjadi sulit pak ini mau keluar bagaimana ini, kadang-kadang mau keluar agak susah. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian karena waktu kita sekarang sudah 12.30 wib ini akan ada Rapat Badan Musyawarah lagi, Komisi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya minta persetujuan apakah jadwal kita dengan berbagai macam catatan yang telah disampaikan bisa kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi, dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini dengan mengucapkan **Alhamdulillahirrabbi'l'amin** rapat ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.21 WIB)

Jakarta, 31 Oktober 2019

SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001